

ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM SISTEM PENDIDIKAN (Studi Kasus di Kabupaten Pamekasan)

Ach. Khoiri
Universitas Islam Madura (UIM) Pamekasan
E-mail: ach.khoiri27@gmail.com

Abstrak;

Masalah politik hukum Sistem Pendidikan di Pamekasan merupakan produk dari kepentingan politik penguasa, karena itu mereka menggunakannya sebagai alat kekuasaan. Pendidikan sebagai subsistem negara memiliki fungsi sebagai pemasok orang berpendidikan, dapat berhasil dalam pembangunan. Di Pamekasan ini, realitas masalah dalam pendidikan tidak dapat dipisahkan dari upaya untuk mendapatkan otoritas. Oleh karena itu, sektor pendidikan adalah media untuk keberhasilan kebijakan untuk mencapai tujuan dan aspirasi utama kepemimpinannya.

Kata Kunci: politik hukum, pendidikan, Pamekasan.

Abstract;

The Problems of education in Pamekasan is the product of political interest of ruler, therefore they use it as a tool of authority. Education as subsystem of the state has function as supplier of educated people, it can succeed in development. In this beloved country, the reality of problems in education can not be separated from the effort to gain the authority. Therefore, educations sector is the medium for the success of the policy to achieve the goal and principal aspiration its leadership.

Keywords : Politic, Education, Pamekasan.

A. Pendahuluan

Azra mengatakan bahwa ketika berbicara tentang instruksi, kebenaran yang ditemukan adalah kerangka sekolah tidak dapat dipisahkan dari strategi politik otoritas publik. Hal ini dapat diikuti dari latar belakang sejarah persoalan legislasi Islam pada masa al-Ma'mun (813 H) sebelum musnahnya madzhab Mu'tazilah yang mendapat bantuan penuh dari para ahli yang pada waktu itu penyelidikan ilmu-ilmu umum bergantung pada alasan dan ujian eksperimental meluap. Dilacak bahwa negara bahkan bekerja dengan karya inovatif logis dari sekolah yang tidak hanya berpusat pada penyelidikan agama Ansih tetapi juga ujian logis secara keseluruhan. Bagaimanapun, setelah runtuhnya kekuatan Mu'tazilah yang digantikan oleh penguasa universalitas Sunni, pergeseran besar mulai terjadi. Misalnya, otoritas publik Nizam al-Mulk pada tahun 1064 yang membuka madrasah dan Jami'ah Nizamiyah sarat dengan kepentingan politik atau inspirasi murni untuk mempertahankan universalitas syariah dalam struktur pemikiran Sunni (Hasan, 2006:77- 78).

Rencana pendidikan yang disusun lebih berpusat pada ujian yang ketat dari pada penyelidikan umum dengan seluk-beluk kenabian. Efek dari kerangka ini adalah bahwa studi fiqh menemukan aktivasinya, tidak demikian halnya dengan studi kalam atau ujian eksperimental lainnya. Para ahli fiqh juga memiliki kedudukan yang luar biasa dibandingkan dengan para peneliti kalam atau lainnya (Azra, 1999: xv). Ia (Azra, 1999: xvi) juga mengungkapkan bahwa apa yang terjadi di kampus al-Azhar pada masa Gamal Abdul Nasser membatalkan kemerdekaan al-Azhar sebagai pembelaan yang diduga untuk melawan berbagai upaya mengubah dunia Islam, Nasser meningkatkan kemerdekaan ini. dengan menetapkan perguruan tinggi di bawah posisinya dan mulai mengirimkan perubahan signifikan dengan menambahkan sumber daya baru seperti obat-obatan, desain, pertanian, aspek keuangan, dan penulisan.

Realitas yang dapat dibuktikan di Pamekasan memberikan tanda yang sama dari masa baik dan buruk negeri ini pada masa perintis Belanda hingga masa kemerdekaan pada masa Sukarno, Suharto, dan BJ. Habibie,

Gus Dur, dan Megawati, atau bahkan SBY, yang merupakan penyesuaian kerangka instruksional yang disandarkan pada kepentingan politik. Hal ini sebenarnya tidak mengherankan bila disinggung dari tujuan pendidikan umum, khususnya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan membina pribadi Indonesia seutuhnya, jadi pada dasarnya uraian ini merupakan penjabaran dari filosofi politik publik yang dikenang untuk daerah pelatihan. (UUD 1945 Revisi dan Klarifikasi, 2001:6). Hal ini dengan alasan bahwa pelatihan merupakan bagian dari perbaikan politik negara yang hanya merupakan konsistensi antara bantalan politik dan cetak biru kemajuan masyarakat yang bergantung pada Pancasila dan UUD 1945.

B. Metode Penelitian

Untuk mengetahui perubahan arah kerangka pendidikan Belajar Merdeka, tulisan ini berupaya mengkaji kualitas kerangka pengajaran dan membedah perubahan pendekatan politik hukum dibidang pendidikan. Pemanfaatan filosofi penyusunan ini menggunakan pendekatan sasaran logis yang jelas (Mufrodi, 1980:10). Sumber informasi opsional yang digunakan mencakup bahan tinjauan hukum yang penting, bahan tambahan yang sah, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum esensial terdiri dari undang-undang, pesan dalam undang-undang dan pilihan hakim. UU yang dikaji adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, tentang Desa. Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Peraturan Presiden nomor 8 tahun 2012, tentang KKNI.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan historis politik hukum Pemerintah di bidang Pendidikan

a. Pendidikan pada masa Kemerdekaan

Menjelang awal kemerdekaan, pemerintah Indonesia belum secara maksimal mencari sekolah untuk kerabatnya, karena beban politik yang sangat

besar dan perjuangan untuk mempertahankan otonomi yang sangat menguras energi dan pemikiran otoritas publik dan individu. Sekalipun ada gangguan politik yang ekstrem, pelatihan masih belum selesai dalam kondisi yang belum sempurna. Masa pemerintahan Soekarno mulai menemukan kepribadian tatanan politiknya pada tahun 1950-an dengan seluk-beluk komunis seperti yang tertuang dalam pilihan MPRSno II/MPRS/1960 tentang orang-orang komunis, maka pada saat itulah kemajuan persekolahan sangat penting bagi pembangunan. Di sekelilingnya diatur tujuan-tujuan perbaikan publik, lebih tepatnya suatu tuntutan masyarakat yang berkeadilan berdasarkan Pancasila. Sekolah dibundel sebagai perangkat progresif dalam iklim kebebasan yang menuntut perputaran roda pengarah dalam segala hal sehingga alasan pengajaran adalah untuk melahirkan warga komunis Indonesia yang idealis, bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat komunis yang adil dan makmur. Sebagaimana ditunjukkan oleh Tilaar (1985: 99-101), jiwa dari rencana pendidikan persekolahan yang berbaur adalah: 1) Jiwa melakukan tatanan persekolahan individu dalam kolaborasi bersama; 2) sistem berbasis Soul of Directed Vote; 3) Jiwa cinta tanah air; dan 4) Jiwa Iman kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.

b. Sistem Pendidikan pada Era Soeharto

Seiring dengan pembangunan pada sektor perekonomian yang melonjaknya kebutuhan tenaga terampil dan SDM yang handal, maka pada pembangunan jangka panjang tahap pertama dari pelita satu hingga keempat, pendidikan Indonesia berorientasi pada *human development*. Sistem ini didasarkan atas kesinambungan antara pendidikan dan tenaga kerja sebagai jawaban atas ketidaksinambungan antara *output* pendidikan dengan kebutuhan tenaga kerja untuk mengisi sektor perekonomian yang berkembang sangat cepat. Sistem yang dikenal dengan *link and match* ini berpengaruh pada dibukanya sekolah kejuruan yang akan

menghasilkan tenaga terampil tingkat menengah serta pelatihan ketrampilan dan kursus.

Tilaar (1985: 142) mengatakan bahwa dalam jangka panjang tahap kedua sebagaimana tertuang dalam rumusan GBHN 1993 yang menegaskan bahwa PJP II merupakan periode kedua kebangkitan nasional yang tumbuh dan berkembang dengan mengandalkan kemampuan sendiri untuk menciptakan kehidupan yang setara. Dengan rumusan tersebut, sistem pendidikan diarahkan pada peningkatan harkat dan martabat manusia serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kurikulum berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan zaman dan tahapan perkembangan. Kurikulum tiga hal, yaitu: 1) kurikulum yang fleksibel; 2) kurikulum yang mengembangkan sikap manusia; 3) kurikulum yang mengembangkan sikap kewirausahaan.

Menurut Suryadi (1994: 237), salah satu upaya pemerataan pendidikan pada era ini adalah dicanangkannya wajib belajar 9 tahun dengan melibatkan peran swasta yang begitu besar untuk memberikan kontribusi bagi pencerdasan bangsa. Aplikasi kurikulum pendidikan pada PJP II cenderung sentralistik yang berdampak pada pengabaian potensi dan budaya daerah. Sentralisasi ini memicu pada problem ketertinggalan berbagai wilayah di Pulau Jawa.

Sisi buram pada produk pendidikan PJP I dan II adalah disorientasi tujuan pendidikan dari mencetak manusia Indonesia yang seutuhnya menjadi berorientasi pada pengembangan iptek namun terjebak pada pendewaan terhadap ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan robot-robot yang produktif namun tanpa memiliki moral dan miskin iman, atau manusia *work-Aholic* yang gersang dari kehangatan kemanusiaan.

c. Pendidikan pada era Reformasi

Menurut Suryodo (1997: 3-4), periode perubahan yang diselaraskan dengan perubahan perjalanan

kehidupan di abad 21 secara fundamental mempengaruhi keberadaan negara. Jika abad kedua puluh digambarkan sebagai seratus tahun kekacauan modern kedua, abad 21 digambarkan sebagai masa globalisasi dan penerimaan. Keduanya dapat dikenali sebagai abad yang penuh dengan perubahan cepat, diskontinuitas, dan keadaan darurat yang tertunda. Para futurolog telah memperingatkan beberapa waktu lalu tentang ujian yang mengesankan ini, antara lain Tofler, Francis Fukuyama dan John Naisbit yang mengingatkan bahwa negara-negara non-industri, termasuk Indonesia, harus mempersiapkan diri untuk acara-acara dunia. Perbaikan Indonesia, termasuk Indonesia, belum selesai. Perkembangan globalisasi secara tak terduga telah dihantam oleh terpancarnya batas-batas politik dan keuangan negara dengan tujuan agar hubungan asosiasi antara negara-negara non-industri dan negara-negara berkembang menjadi lebih mudah. Indonesia menghadapi penjajahan sistem kepercayaan, masalah legislatif, keamanan, budaya seperti ilmu pengetahuan dan inovasi tanpa oposisi kritis.

Kondisi sosial politik di Pamekasan mengharuskan pemerintah pada masa Badrut Tamam untuk menggelogori peningkatan pendidikan sains dan teknologi sebagai upaya melawan penjajah di sektor iptek, akan tetapi proyek tersebut terkoyak dengan perubahan konstelasi perpolitikan yang begitu cepat. Sementara itu, pada masa Syafi'i keberhasilan yang mencolok justru terjadi pada pendidikan berpolitik di mana kebebasan dibuka seluas-luasnya yang berdampak pada amunisi bagi pemerintahan sendiri dengan jatuhnya Syafi'i dari kekuasaan. Pada pemerintahan Kholilirrhman dan dilanjutkan pemerintahan Indonesia bersatu disusun pendidikan berbasis kompetensi yang tidak lagi sentralistik namun lebih memberikan kesempatan pada pengembangan potensi dan budaya daerah, di satu sisi mengacu pada kompetensi atau kemampuan dan ketrampilan pada tiga aspek pendidikan yaitu, *kognitif*, *afektif*, dan

psikomotorik. Menurut Freire dkk. (1999:138) kurikulum dengan basis kompetensi ini diharapkan dapat menjadi jawaban atas orientasi kognitif *ansich* pada kurikulum yang telah berlaku sehingga peserta didik diharapkan dapat memiliki pengetahuan (*learn to know*), memiliki skill dalam mengaplikasikan keilmuan (*learn to do*), memiliki sikap dan kepribadian (*learn to be*), dan akan menghasilkan *output* pendidikan yang memiliki kesalehan sosial (*learn to life together*).

Konsep general edukasi yang diaplikasikan pada sistem KBK merupakan respon atas carut marutnya wajah pendidikan yang sangat memprihatinkan, baik dari sisi kualitas intelektual maupun integritas moral serta semangat nasionalisme dan patriotisme yang diharapkan dapat menjawab krisis produk pendidikan yang sedang melanda negara Indonesia.

Pasca jatuhnya pemerintahan Syafi'i yang dilanjutkan pemerintahan selanjutnya dunia pendidikan masih terus mengharapkan peran pemerintah untuk menciptakan sebuah sistem yang handal sehingga menghasilkan *output* pendidikan yang dapat bersaing dan berkualitas. Menilik dari kebijakan politik pemerintahan Indonesia bersatu saat ini tampak bahwa kebijakan sektor pendidikan masih tambal sulam dan cenderung memberikan kepuasan sesaat bagi rakyat bukan kebijakan strategis yang dapat mendongkrak mutu pendidikan dalam menghadapi persaingan global. Kebijakan pendidikan yang dirasa sebagai "lipstik" semata dapat dilirik sebagai upaya pemerintah menenangkan masyarakat dan menciptakan stabilitas serta kepercayaan dan harapan cemerlang atas pemerintahan yang baru. Seperti dengan diberlakukannya kebijakan untuk tidak mengganti buku panduan belajar tingkat dasar, menengah dan umum selama lima tahun serta penyertaan *output* pendidikan dalam dunia kerja dengan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil besar-besaran serta ramainya dibuka bursa kerja di kampus-kampus Perguruan Tinggi Negeri dan Pemda. Kebijakan ini pun tidak terlepas dari trik politik untuk

mengurangi beban politis penguasa karena dengan besarnya jumlah pengangguran akan berdampak pada melebarnya kelas ekonomi serta rawan terhadap munculnya keresahan sosial.

Agaknya pemerintahan sekarang tidak mau dipusingkan dengan kondisi kesenjangan sosial yang ada. Bagi praktisi pendidikan, sebenarnya yang lebih penting dari penciptaan stabilitas sosial walaupun itu juga penting adalah kebijakan pendidikan yang strategis bagi peningkatan sumber daya yang berkualitas. Terakhir, pada masa pemerintahan Badrut Tamam, juga menginginkan upaya peningkatan kualitas pendidikan anak bangsa ini. Ketika pada era pemerintahan sebelumnya, telah terdapat konsensus bersama dalam memberlakukan rekonstruksi kurikulum dengan KBK-nya, namun dalam era sekarang ini juga terdapat perbaikan-perbaikan kurikulum dengan KTSP-nya, yang sekarang sudah masuk dalam lini birokrasi pendidikan di Indonesia masih dalam proses. Sesungguhnya, KBK dan KTSP yang menjadi *ruhiyah* memiliki kemiripan, yang secara substansi memiliki banyak persamaan dalam menghasilkan *out put* yang berkualitas.

Dari sisi lain, pemerintah Badrut Tamam telah mencanangkan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dengan target 20% dalam kerangka upaya peningkatan kualitas pendidikan kita, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. Namun pada proses pelaksanaannya sampai saat ini masih terdapat tarik menarik yang belum sesuai dengan harapan masyarakat.

2. Kecenderungan Pergeseran Orientasi Politik hukum di Bidang Pendidikan

Kebenaran ketergantungan antara masalah dan instruksi pemerintah seperti yang diungkapkan dalam informasi di atas atau sebaliknya, dampak sekolah pada masalah legislatif adalah kebutuhan. Kebutuhan ini dapat dilihat dari substansi persoalan legislasi sebagai bagian dari kehidupan masing-masing di mata publik yang meliputi relasi kuasa dan koneksi kekuatan (Gani,

1987:16-17). Isu-isu pemerintahan sebagai pekerjaan untuk memperoleh kekuasaan, memperluas dan mengikuti kekuasaan, memahami tujuannya dalam berbagai strategi yang diidentifikasi dengan persyaratan kehidupan individu. Lagi pula, sekolah sebagai mata pelajaran untuk mempertahankan kehadiran siswa yang berbaur, menggali, dalam gaya hidup dengan ukuran lingkungan, publik, dan dunia berkontribusi signifikan terhadap penguatan wilayah lokal yang merupakan salah satu andalan mempertahankan kemajuan (Tilaar, 1999):28). Ini berarti bahwa strategi administrasi di bidang apa pun tidak dapat dipisahkan dari hasil pembelajaran karena bidang ini memasok kebutuhan individu yang berbakat dan solid untuk mencapai kemajuan.

Dugaan ini juga dapat dibalik bahwa sifat masyarakat dengan pendidikan yang berkualitas akan mempengaruhi pengelompokan bintang politik sebagai individu yang cerdas hanya akan memilih perintis yang brilian, individu yang terpelajar akan memilih utusan yang berwibawa sehingga individu dari DPR adalah berbagai individu yang cerdas. Demikian pula, pelatihan dengan kerangka doktrinal dan terpadu seperti pada zaman Permintaan Baru akan membentuk kerangka politik oligarki tiran. Hal ini unik dalam kaitannya dengan kerangka instruksi terbuka yang dapat membuat kerangka politik yang lugas dengan kontrol sosial yang dinamis di wilayah setempat. Dari anggapan ini, sifat persekolahan suatu negara dapat dilihat dari para ahli politik yang bermain di dalamnya.

Sesuai dengan Ma'arif (2002:8), untuk menjalankan hipotesis di atas dan melihat perubahan strategi pemerintah di bidang pelatihan, cenderung terlihat bahwa dengan batasan kuantitatif, kemajuan sekolah menunjukkan angka yang luar biasa. Tingkat pendidikan yang rendah dapat diturunkan menjadi sekitar 15% dibandingkan dengan awal kebebasan yang mencapai 90%. Pencapaian ini merupakan produk dari isu legislasi pelatihan massal sebagai lawan langsung dari isu pemerintahan elitis pionir. Masyarakat Indonesia mungkin senang melihat peningkatan pengajaran sejauh dapat

dipercaya, namun jika dibandingkan dengan negara lain, kebanggaan dapat berubah menjadi demoralisasi karena mereka jauh tertinggal dari segi kualitas dan jumlah. Dalam pemerintahan Soeharto yang menitikberatkan pada gagasan *connection and match* instruksi, ternyata informasi terukur ke arah ini tidak punya pilihan untuk membantu perekonomian. Peningkatan budaya Madura secara keseluruhan atau Pergantian materi dan dunia lain". Ini melibatkan kebanggaan sejauh pepatah namun sejauh pelaksanaannya telah berubah menjadi Peningkatan budaya Indonesia yang pecah" dengan alasan bahwa ada jeda yang signifikan antara apa yang disusun dan apa yang dilakukan, sehingga tumpahan subsidi kemajuan datang. sampai 30%. negara paling merosot kelima di planet ini.

Sistem penalaran yang dapat digunakan sebagai penelitian arah pelatihan berbasis negara pasar adalah hipotesis sumber daya manusia yang menjelaskan bahwa pengajaran mempengaruhi perkembangan moneter mengingat tugas sekolah dalam meningkatkan efisiensi kerja. Hipotesis ini menerima bahwa perkembangan masyarakat dimulai dari efisiensi individu. Jika setiap individu memiliki gaji ligo yang besar karena pendidikan yang maju, maka pembangunan ekonomi daerah dapat dipertahankan. Bagaimanapun, ini benar-benar berbeda di antara negara-negara maju dan agraris. Di Indonesia, pelatihan formal hanya menawarkan lebih sedikit status kerja. Kekecewaan hipotesis sumber daya manusia yang menunjukkan bahwa lulusan sekolah tidak siap untuk bekerja sesuai asumsi kerja dijawab oleh hipotesis kredensialisme. Hipotesis ini menerima bahwa konstruksi masyarakat lebih luar biasa daripada manusia dalam memberdayakan pembangunan dan kemajuan, karena sekolah formal sering dilihat sebagai metode untuk mengikuti bisnis seperti biasa dari pemegang kesejahteraan ekonomi. Hipotesis ini menganggap formal hanya sebagai kepentingan dangkal melalui pengadaan sertifikat dan bukan kegunaan. Dari hipotesis ini, kapasitas pengajaran formal tidak akan melahirkan spesialis yang berbakat, tetapi hanya bekerja sebagai

media penting dalam mencakup pelatihan dengan kebutuhan bisnis. Kekecewaan pembelajaran di PJP II dimana masih banyak hasil sekolah yang menganggur merupakan efek samping dari kegagalan kerangka pelatihan untuk menciptakan lulusan yang dapat dipersiapkan atau yang dapat membantu diri mereka sendiri untuk menjadi tenaga kerja berbakat sesuai kebutuhan pasar.

Sejak pembangunan Orde Baru hingga masa Reformasi problem yang dihadapi dunia pendidikan adalah besarnya jumlah pengangguran terdidik yang berakses pada problem ketenagakerjaan dan sosial yang disinyalir merupakan produk dari sistem pendidikan yang tidak berkualitas. Problem besar itu merupakan buah dari sistem pendidikan yang menekankan pada fungsinya sebagai pemasok tenaga kerja terdidik (*driving force*). Program pendidikan formal lebih bertujuan membentuk lulusan yang menguasai pengetahuan dan ketrampilan dari pada menguasai kemampuan dan kemauan belajar. Jika kemampuan dan kemauan belajar ditumbuhkan, lulusan akan menjadi tenaga kerja kreatif sehingga pengetahuan dan ketrampilan menjadi modal dalam mengembangkan diri di masyarakat dan dunia kerja.

3. Rekonstruksi *law Political of Education*: Sebuah Solusi alternatif

Bermula dari pengaruh kebijakan politik terhadap pendidikan di Pamekasan yang berarti juga berimplikasi pada lahirnya, berbagai problematika muncul di permukaan, maka sudah barang tentu mengundang pula keprihatinan para pakar pendidikan di Pamekasan, sebagaimana menurut Fadjar (2004:7), yang melukiskan suatu sintesa, konvergensi, dan sinergisitas dualisme-dikotomik. Ia (Fadjar, 2004:6-7) juga mengungkapkan bahwa menurutnya, integralisasi tersebut dapat melahirkan kesatuan antara *moralitas-rasionalitas, ruhaniah- jasmaniah*. Selanjutnya, menurut Hasan (2004: 247), perlu upaya menyuarakan wacana "pendidikan berbasis masyarakat" (*Community Based Education*).

Statemen terakhir, dijelaskan bahwa ada beberapa model keterlibatan masyarakat terhadap lembaga-

lembaga pendidikan yang diusulkan sebagai berikut: (1) Berupa dukungan (*support*), dalam arti orang tua dan anggota masyarakat memberikan sumbangan dana atau tenaga (2) Keterlibatan (*involvement*), orang tua dan anggota masyarakat terlibat atau memberikan bantuan dalam pengambilan keputusan masalah pendidikan (3) Kemitraan (*partnership*), orang tua dan anggota masyarakat menjalin hubungan kemitraan yang sejajar dengan pengelola sekolah/madrasah dalam menentukan hal-hal yang berhubungan pengelolaan pendidikan (4) Kepemilikan penuh (*full awnernesship*), para orang tua dan masyarakat mengendalikan semua kebijakan/ keputusan tentang program pendidikan (Nielson, 2000: 178-179).

Kebenaran strategi politik pendidikan umum, termasuk ajaran Islam selama organisasi SBY saat ini, sehingga persekolahan di Indonesia lebih cocok untuk perencanaan ke depan dan dapat dipertimbangkan, khususnya ajaran Islam sehingga menjadi pilihan, kemudian, pada saat itu pada dasarnya ada Ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut: Pertama, kejelasan antara apa yang dicoba dengan kemajuan fungsional. Kedua, melibatkan perusahaan yang ada dengan merevisi kerangka kerja. Ketiga, peningkatan, pembaruan, dan kemajuan dalam kerangka administrasi atau dewan. Keempat, memperluas SDM yang dibutuhkan (Fadjar, 1998:13).

Sesuai dengan penegasan di atas, Djojonegoro (1995: 124) berpendapat bahwa ada pola-pola berbeda yang menentukan arah perubahan instruktif yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 1) Persekolahan semakin dituntut untuk tampil sebagai kunci dalam peningkatan mutu pendidikan. SDM 2) Dalam bidang pekerjaan, arah menuju kapasitas asli (*what one can do*) yang dapat ditunjukkan oleh lulusan pelatihan harus lebih membumi 3) Sebagai dampak globalisasi, sifat persekolahan suatu negara tidak hanya diperkirakan tergantung pada aturan di negara itu, namun berbeda dengan negara lain. Meski demikian, berbagai tawaran pilihan yang diharapkan, memang, secara substansi hanya bergantung pada program pendidikan. Hal ini ditegaskan oleh Ghony

(2007:13-14), dalam wacana pengenalan keilmuannya di Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UIN) Malang, ada kira-kira tiga kalangan yang meliputi perencanaan pendidikan, lebih spesifiknya, mendekati persoalan legislatif, daerah setempat. kebutuhan, dan tujuan kehadiran.

D. Penutup

Wajah pendidikan di Pamekasan sebagai produk dari kepentingan politik penguasa menempatkan pendidikan sebagai salah satu alat kekuasaan. Realitas ini dapat dibaca dari teori fungsional *Durkheimian* yang memandang bahwa masyarakat sebagai unifikasi dari berbagai macam subsistem akan berjalan efektif jika setiap subsistem digerakkan untuk mendukung sistem yang ada. Demikian pula dengan pendidikan sebagai subsistem dari negara jika difungsikan sebagai alat pemasok kalangan terdidik maka dapat mensukseskan pembangunan. Jika pembangunan diorientasikan untuk mencukupi kebutuhan rempah-rempah dan kejayaan alam negeri penjajah maka pendidikanpun diformat untuk mencetak tenaga kasar dan buruh. Hal ini berbeda dengan masa Badrut Tamam yang menginginkan kepemimpinan maju maka pendidikan difokuskan pada penumbuhan semangat patriotisme anak bangsa. Berbeda lagi pada masa Syafi'i yang sosialis, pendidikanpun digerakkan berdasarkan dengan asas gotong royong. Sementara pada era Kholilurrahman yang memproklamirkan diri sebagai "Bapak Pembangunan" maka pendidikanpun diformat untuk mencetak tenaga terampil penopang kesuksesan dan pendongkrak pertumbuhan ekonomi. Sementara pada era pemerintahan Indonesia Bersatu agaknya orientasi pendidikan masih berkuat untuk menyelesaikan kerikil-kerikil penghambat pendidikan yaitu membludaknya angka pengangguran, meskipun banyak juga para pakar pendidikan kita yang berusaha memberikan tawaran alternatif dalam penyelesaiannya.

Demikianlah realitas politik Pendidikan di Pamekasan dalam menyikapi problematika pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari upaya melanggengkan kekuasaan dengan memfungsionalkan berbagai subsistem, sehingga termasuk

sektor pendidikan dijadikan sebagai sarana dan wadah untuk menyukseskan kebijakan yang dilancarkannya dalam menggapai tujuan dan cita-cita utama kepemimpinannya. Tentunya aktor politik yang bertanggung jawab akan menghantarkan masyarakatnya pada kejayaan sebuah negeri yang ideal sebagaimana tergambar dalam al-Qur'an "*baldatun thoyyibatun wa robbun ghofuur*", demikian pula sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, S.A., 2019. Politik Hukum: Mencari Sejumlah Penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), pp.77-86
- Saraswati, R., 2014. Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum). *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), pp.313-321
- Ismail, N., 2012. Arah politik hukum pertanahan dan perlindungan kepemilikan tanah masyarakat. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 1(1), pp.33-51.
- Azra, Azyumardi. 1999. *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Modern*. Jakarta: Logos.
- Nielson, Dean. 2000. "Memetakan Konsep Pendidikan Berbasis Masyarakat di Indonesia" dalam *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*. Jakarta: Bappenas.
- Djojonegoro, Wardiman. 1995. "Transformasi Pendidikan dan Pengembangan SDM" dalam *ICMI, Beberapa Catatan Kritis*. Jakarta: Amanah Putra Nusantara
- _____. 2004. *Sintesa antara Perguruan Tinggi dengan Pesantren: Upaya Menghadirkan Wacana Pendidikan Alternatif*. Malang: Universitas Islam (UIN) Malang.
- Ghony, Djunaidi, M. 2007. "Paradigma Pengembangan Kurikulum dalam Peningkatan Mutu Pendidikan Tinggi Islam" dalam *Pidato Pengukuhan Jabatan Gruru Besar UIN Malang*. Malang: UIN Malang.
- Freire, Paulo, dkk. 1999. *Menggugat Pendidikan Fundamental, Konservatif, Liberalis, Anarkis*. Yogyakarta: Pustaka pelajar.
- Ismail Ghani, Soelistiyati. 1987. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Pustaka Saadiyah.
- Maarif, Syafii. 2002. *Posisi Umat Islam dalam Konteks Pembangunan Nasional dalam Tantangan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia.

Mufrodi, Ali. 1980. "Metode Penelitian Sejarah dan Kebudayaan Islam" dalam Makalah: *Metode Penelitian dalam Sejarah*. Surabaya: T.p.

Thalhah Hasan, Muhammad. 2006. *Dinamika pemikiran tentang Pendidikan Islam*. Jakarta: Lantabora Press.

Suryadi, Ace. 1994. *Analisis Kebijakan Pendidikan: Suatu Pengantar*. Bandung: Rosda Karya.

Surya, Djoko. 1997. *Membangun Visi ke Depan: Refleksi atas Masalah Pembangunan dalam Tantangan Pembangunan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.